

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Abrar Saleng, *Hukum Pertambangan*, UII Press, Yogyakarta, 2004.
- Adrian Sutedi, *Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.
- Algra, dkk, *Mula Hukum*, Binacipta, Bandung, 1975.
- Algra N.E et.al, *Kamus Istilah Hukum Fockema Andreae Belanda-Indonesia*, Binacipta, Jakarta, 1983.
- Ali Acham Chomzah, *Hukum Agraria (Pertanahan Indonesia)*, Prestasi Pustakaraya, Jakarta, 2003.
- Aminuddin Salle, dkk, *Bahan Ajar Hukum Agraria*, AS Publishing, Makassar, 2010.
- A.P. Parlindungan, *Pedoman Pelaksanaan UUPA dan Tata Cara Pejabat Pembuat Akta Tanah*, Alumni, Bandung, 1978.
- Bachsan Mustafa, *Hukum Agraria dalam Perspektif*, Remadja Karya CV, Bandung, 1985.
- Bernard L. Tanya, dkk, *Teori Hukum Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, Yogyakarta, 2010.
- Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria*, Djambatan, Jakarta, 1999.
- Eddy Ruchiyat, *Politik Pertanahan Sebelum dan Sesudah Berlakunya UUPA*, Almuni, Bandung, 1984.
- Effendi Perangin, *Hukum Agraria di Indonesia*, Grafikatama, Jakarta, 1989.
- Gatot Supramono, *Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 2012.

- H. Abd. Rahman, dan Baso Madiong, *Politik Hukum Pertanahan*, Celebes Media Perkasa, Jakarta, 2017.
- H.M. Arba, *Hukum Agraria Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015.
- HR.Ridwan, *Hukum Administrasi Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007.
- Husni Thamrin, *Pembuatan Akta Pertanahan oleh Notaris*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2011.
- I Made Arya Utama, *Hukum Lingkungan: Sistem Hukum Perizinan Berwawasan Lingkungan*, Pustaka Sutra, Bandung, 2007.
- Ida Nurlinda, *Prinsip-Prinsip Pembaharuan Agraria Perspektif Hukum, Edisi I*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2009.
- Jeane Neltje Saly, *Penelitian Hukum Pemanfaatan Hak Atas Tanah Dalam Hubungannya Dengan Usah Tani*, Badan Pembinaan Hukum Nasional departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Jakarta, 2007.
- Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif Edisi Revisi*, Bayumedia Publishing, Malang, 2007.
- Kamaluddin Patradi, *Pemberian Kuasa Dalam Praktek Perjanjian Pengikatan Jual Beli Hak Atas Tanah*, Press, Yogyakarta, 2010.
- Marmia M. Roosadijo, *Tinjauan Pencabutan Hak-Hak Atas Tanah dan Benda-Benda yang Ada Di Atasnya*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1976.
- Muchtar Rudianto, *Perjanjian Pengikatan Jual-Beli Sebagai Perjanjian Pendahuluan*, Rajawali Press, Jakarta, 2010.
- Murad Rusmadi, *Penyelesaian Sengketa Hukum Atas Tanah*, Alumni, Bandung, 1992.

- N.M.Spelt dan J.B.J.M. ten Berge, *Pengantar Hukum Perizinan*, disunting oleh Philipus Mandiri Hadjon, Yuridika, Surabaya, 1993.
- Nanang Sudrajat, *Teori dan Praktik Pertambangan Indonesia Menurut Hukum Indonesia*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2010.
- Notonagoro, *Politik Hukum dan Pembangunan Agrarian*, Bina Aksara, Jakarta, 1984.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2013.
- Pudyatmoko, Y. Sri, *Pengantar Hukum Pajak*, Penerbit Andi, Yogyakarta, 2009.
- Purnadi Purbacaraka dan Ridwan Halim, *Sendi-Sendi Hukum Agraria, Cetakan Pertama*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1984.
- R. Wiratno, dkk, *Ahli-Ahli Pikir Besar tentang Negara dan Hukum, Pembangunan*, Jakarta, 1958.
- Rahmat Trijono, dkk, *Hak Menguasai Negara di Bidang Pertanahan*, Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), Jakarta, Desember 2015.
- Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999.
- Roestandi Ardiwilaga R., *Hukum Agraria Indonesia*, N.V. Masa Baru, Bandung, 1962.
- Rusmanto Hadiman, *Jual Beli Hak Atas Tanah Berdasarkan Surat Keterangan Kepala Desa (Suatu Tinjauan Yuridis Praktis)*, Eresco, Bandung, 2011.
- Sahnan, *Hukum Agraria Indonesia*, Setara Press, Malang, 2016.
- Salim HS, *Hukum Pertambangan di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004.

- Salim, H. S., *Hukum Pertambangan Indonesia. Edisi Revisi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005.
- Sajipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.
- Setyosari Punaji, *Metode Penelitian Pendidikan dan Pengembangan*, Kencana, Jakarta, 2010.
- Soedikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata di Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 1988.
- Sukanda, *Penegakan Hukum Pertambangan di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.
- Supriadi, *Aspek Hukum Tanah dan Aset Daerah*, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2010.
- Supriadi, *Hukum Agraria*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.
- Tri Handayani, *Legalitas Surat Keterangan Tanah Yang Dikeluarkan Oleh Kepala Desa Sebagai Dasar Transaksi Jual Beli Tanah (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung No. 31.Pk/Tun/2005)*, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Medan, 2016.
- Urip Santoso, *Hukum Agraria dan Hak-Hak Atas Tanah*, Pernada Media, Jakarta, 2005.
- Yanis Maladi, *Signifikansi Sosial Pendaftaran Tanah di Resort Wisata Selong Belanak Pulau Lombok*, Tesis S2 Program Pascasarjana Universitas Airlangga, 1988.
- Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015.

B. JURNAL

- Eddy M. Leks, *Analisis Hukum Tentang Kewenangan Pemberian Izin Usaha Pertambangan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang*

Pertambangan Mineral dan Batubara, Jurnal Hukum Bisnis, Volume 31 - Nomor 2, 2012.

Hayatul Ismi, *Hak Atas Tanah Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam Mineral Dan Batubara*, Jurnal Ilmu Hukum, Volume 4 No. 2, Februari-Juli 2014.

Husnul Khatimah Abrar, *Hak Atas Tanah Kontra Izin Usaha Pertambangan*, Jurnal Hukum Bisnis, Volume 31 – Nomor 2, 2012.

J. Ronald Mawuntu, *Konsep Penguasaan Negara Berdasarkan Pasal 33 UUD 1945 dan Putusan Mahkamah Konstitusi*, Jurnal Hukum Universitas Sam Ratulangi, Volume XX, April-Juni, 2012.

Syafruddin Kalo, *Perbedaan Persepsi Mengenai Penguasaan Tanah dan Akibatnya Terhadap Masyarakat Petani di Sumatera Timur pada Masa Kolonial yang Berlanjut pada Masa Kemerdekaan, Orde Baru dan Reformasi*, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, 2004.

Tri Handayani, *Legalitas Surat Keterangan Tanah Yang Dikeluarkan Oleh Kepala Desa Sebagai Dasar Transaksi Jual Beli Tanah (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung No. 31.PK/TUN/2005)*, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Medan, 2016.

C. ARTIKEL DALAM SEMINAR DAN LAIN-LAIN

Maria S.W. Sumardjono, *Redefinisi Hak Atas Tanah: Aspek Yuridis dan Politis Pemberian Hak di Bawah Tanah dan di Ruang Udara*, Disampaikan dalam Seminar Nasional Hak Atas Tanah dalam Konteks Masa Kini dan Yang Akan Datang yang Diselenggarakan Atas Kerjasama dengan Fakultas Hukum UGM-BPN, Yogyakarta, 15 Oktober 1991.

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, *Risalah Sidang Perkara Nomor 10/PUU-XII/2014 Perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Terhadap Undang-*

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Acara: Mendengarkan Keterangan Ahli/Saksi dari Presiden Dan Pihak Terkait (VI), Dokumen Risalah Sidang MK RI, Jakarta, September 2014.

D. RUJUKAN ELEKTRONIK

Dadang Iskandar, *Tanah Girik Vs Tanah Sertipikat*, <http://properti.kompas.com/read/2013/07/11/1549074/Tanah.Girik.vs.Tanah.Sertifikat>, diakses pada tanggal 4 November 2017 pukul 17.54.

<http://www.suduthukum.com/2015/09/perlindungan-hukum.html>, diakses pada tanggal 31 Oktober 2017 pukul 21.06 WIB.

Hukum Online, *Hukumnya Membantu Melakukan Penyerobotan Tanah*, <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt5914506870590347ebjh/hukumnya-jika-kepala-desa-membantu-melakukan-penyerobotan-tanah>, diakses pada tanggal 5 November 2017 pukul 9.06 WIB.

Ilham, *Kewajiban Pengolahan & Pemurnian Bahan Mineral Sesuai Konstitusi*, <http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/index.php?page=web.Berita&id=10434#.Wf8rHPmCzIIW>, diakses pada tanggal 3 November 2017 pukul 22.29 WIB.

Joel Tambunan, *Indonesia Kaya Akan Sumber Daya Alam Namun Miskin Sumber Daya Manusia*, <http://fwatcer.fwi.or.id/indonesia-kaya-akan-sumber-daya-alam-namun-miskin-sumber-daya-manusia/>, diakses tanggal 8 September 2017 pukul 20.31 WIB.

Johan Kurnia, *Prosedur Pemberian Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi*, <http://www.hukumpertambangan.com/izin--usaha--tambang/prosedur--pemberian-izin-usaha-pertambangan-iup-eksplorasi/>, diakses pada tanggal 20 Oktober 2017 pukul 01.53 WIB.

Mongabay Indonesia, *Lisensi dan Perizinan*,
<http://www.mongabay.co.id/lisensi-dan-perizinan/>, diakses pada tanggal 5
November 2017 pukul 09.57 WIB.

Rizky Nugraha, *7 Komoditi Ekspor Andalan Indonesia*,
<http://www.dw.com/id/7-komoditi-ekspor-andalan-indonesia/g-19297445>,
diakses tanggal 9 September 2017 pukul 08.23 WIB.

Theresia C. Pasaribu, *Asas-Asas Hukum Agraria*,
<https://www.hukumproperti.com/agraria/asas-asas-hukum-agraria/>, diakses
pada tanggal 19 Oktober 2017 pukul 10.24 WIB.

Tim Komunikasi Energi dan Sumber Daya Manusia (ESDM), *Indeks Tata
Kelola Tambang dan Migas Indonesia Peringkat 11 dan 12 Dunia*,
<https://www.esdm.go.id/id/media-center/arsip-berita/indeks-tata-kelola-tambang-dan-migas-indonesia-peringkat-11-dan-12-dunia>, diakses tanggal
9 September 2017 pukul 08.39 WIB.

Wibowo Turnady, *Sumber Hukum Agraria*,
<http://www.jurnalhukum.com/sumber-sumber-hukum-agraria/>, diakses
pada tanggal 18 Oktober 2017 pukul 19.51 WIB.

E. PERATURAN PERUNDANG - UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan
Batubara.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok
Agraria.

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan
Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin yang Berhak atau Kuasanya.

